

BAB II

KEBIJAKAN LUAR NEGERI CHINA DI KAWASAN ASIA SELATAN

Sejarah masa lalu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri China saat ini. Hal ini dikarenakan sejarah memiliki arti yang sangat penting bagi China dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Bab ini akan membahas tentang dasar-dasar kebijakan luar negeri China dan kebijakan luar negeri China terhadap kawasan Asia Selatan yang nantinya akan berpengaruh terhadap sikap China dalam konflik Kashmir.

2.1 Dasar-Dasar Kebijakan Luar Negeri China

China atau Republik Rakyat China dikenal sebagai pusat peradaban dunia yang selama berabad-abad dipimpin oleh beberapa dinasti terkemuka. Namun, setelah terjadinya serangkaian peristiwa kerusuhan sipil dan revolusi, China beralih menjadi sebuah negara republik dengan ideologi komunis di bawah pemerintahan Mao Zedong dan Partai Komunis China di tahun 1949. Meskipun pemerintahan China telah beralih ke arah pemerintahan yang baru, China masih terisolasi dari ranah politik internasional dan belum memiliki relasi dengan banyak negara. Untuk itu, sesaat setelah kemerdekaan China, dalam banyak kesempatan, Mao Zedong menyatakan bahwa China siap membangun relasi dengan banyak negara. China membutuhkan sebuah landasan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan prinsipnya sebagai negara yang independen dalam hubungan internasional (Panda, 2014). Prinsip-prinsip ini kemudian dikenal dengan nama *Five Principles of Peaceful Coexistence*.

Prinsip-prinsip ini ditulis oleh PM Zhou Enlai pada tahun 1953 dan pertama kali dipublikasikan saat perjanjian kerjasama di wilayah Tibet antara China dan India pada tahun berikutnya (Zhou Enlai Peace Institute, 2013). Selanjutnya, *Five Principles of Peaceful Coexistence* berkembang dan tidak hanya digunakan sebagai dasar dari hubungan luar negeri antara China dan India saja, tetapi juga dengan banyak negara lainnya yang sepakat dengan konsep perdamaian dan keamanan dunia. Kelima prinsip ini terdiri dari: *mutual respect for sovereignty and territorial integrity* (saling menghargai integritas teritorial dan kedaulatan), *mutual non-aggression* (tidak saling menyerang), *non-interference in each other's internal affairs* (tidak saling mengganggu/mencampuri urusan dalam negeri negara lain), *equality and mutual benefit* (kesetaraan dan saling memberikan keuntungan), dan *peaceful coexistence* (saling hidup dengan damai) (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2014).

Kebijakan luar negeri China sendiri hingga kini masih merupakan cerminan dari *Five Principles of Peaceful Coexistence*. China menggunakan serangkaian prinsip ini sebagai dasar perumusan kebijakan luar negerinya, yang menjadi serangkaian panduan bagi China dalam membangun relasinya dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral. *Five Principles of Peaceful Coexistence* juga memainkan peran penting dan memberikan dampak positif dalam membangun tatanan politik dan ekonomi dunia yang adil. Pasalnya, prinsip-prinsip ini telah berhasil melawan tradisi imperialisme dan kolonialisme terhadap negara-negara dunia ketiga (Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of China, 2014). Sebagai salah satu negara yang sejak

awal gigih melawan China selalu menekankan adanya kesetaraan untuk setiap negara.

China melihat bahwa setiap negara memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama di mata internasional, sehingga China berani merangkul semua negara untuk bekerjasama dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang adil dan setara bagi semua pihak tanpa adanya dominasi dan dari sebuah negara adidaya. Hingga saat ini, China menganggap bahwa *Five Principles of Peaceful Coexistence* juga masih cukup relevan untuk dijadikan pondasi kebijakan luar negerinya, meskipun prinsip-prinsip ini telah berusia lebih dari enam dekade. Hal ini dikarenakan nilai-nilai koeksistensi damai yang terkandung di dalamnya dinilai masih sesuai untuk kebijakan luar negeri China hingga saat ini.

2.2 Dinamika Kebijakan Luar Negeri China Terhadap Kawasan Asia Selatan

Kawasan Asia Selatan adalah sebuah kawasan yang terdiri delapan negara utama, yaitu India, Pakistan, Bhutan, Sri Lanka, Maladewa, Bangladesh, Afghanistan dan Nepal yang tergabung dalam SAARC atau *South Asian Association for Regional Cooperation* dimana India dan Pakistan merupakan dua negara yang paling besar dan berpengaruh di kawasan. Menurut data kependudukan dari PBB, kawasan ini merupakan kawasan paling padat di dunia dengan estimasi penduduk sebanyak 1,7 milyar orang (UN, 2017). Hal ini menjadikan kawasan Asia Selatan kaya akan ragam suku, etnis dan budaya. Secara geografis, Asia Selatan juga merupakan kawasan yang strategis. Kawasan ini terhubung langsung baik melalui jalur darat maupun laut dengan kawasan lainnya, seperti kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Timur. Hal ini

menjadikan kawasan Asia Selatan syarat dengan aktivitas ekonomi dan politik internasional dengan berbagai negara di luar kawasan, salah satunya adalah China.

China merupakan salah satu negara yang memiliki perbatasan darat langsung dengan kawasan Asia Selatan. Keduanya saling berbagi wilayah perbatasan seperti bentang alam (sungai-sungai dan gunung), peradaban, budaya, dan agama. Dua wilayah China seperti wilayah Otonomi Tibet dan Xinjiang juga berbatasan langsung dengan empat negara kawasan Asia Selatan, yaitu India, Pakistan, Bhutan, dan Nepal (China Study Center, 2003). Interaksi antara China dengan kawasan Asia Selatan sendiri telah menjadi sebuah tradisi sejak dahulu. Interaksi antara keduanya pun hanya sebatas interaksi budaya dan perdagangan antara kekaisaran China dengan India, meskipun penemuan arkeologi menemukan catatan sejarah antara keduanya yang memiliki angka tahun 221 SM. Keterbatasan ini dikarenakan China pada saat itu lebih mengutamakan interaksinya dengan kawasan Asia Tenggara, terutama dengan Burma dan Thailand (Cheng, 2010). Interaksi politik antara keduanya baru dimulai di pertengahan abad ke-19 ketika China dan negara-negara kawasan Asia Selatan baru saja terbentuk.

Seiring dengan berjalannya waktu, interaksi antara China dan kawasan Asia Selatan juga mulai mengalami peningkatan yang cukup pesat. Saat ini, China mampu merangkul hampir semua negara di kawasan ini dengan menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Kedekatan ini tentunya juga tidak lepas dari peranan kebijakan luar negeri China yang bersahabat dan mengutamakan kesetaraan bagi semua pihak, sehingga dapat diterima oleh negara-negara di kawasan Asia Selatan. China selalu ingin untuk memperluas

pengaruh ekonomi dan politiknya di kawasan Asia Selatan. Secara umum obyek kebijakan luar negeri China merupakan kombinasi dari beberapa aspek, diantaranya: keunikan hubungan bilateral China dengan negara-negara kawasan Asia Selatan, perluasan sektor perekonomian, isu keamanan dan terorisme, sengketa perbatasan, pertumbuhan India dan eksistensi Amerika Serikat di kawasan (Roy, 1998). Sedangkan, untuk sikap China terhadap konflik Kashmir sendiri merupakan cerminan dari kebijakan luar negeri China terhadap kawasan Asia Selatan. Obyek-obyek kebijakan luar negerinya pun juga merupakan hasil dari perkembangan dan dinamika iklim politik internasional dan pergantian rezim di China sejak era sebelum dan saat era Xi Jinping.

A. Kebijakan Luar Negeri China Di Kawasan Asia Selatan Era Mao Zedong (1949-1976)

Kebijakan luar negeri China terhadap kawasan Asia Selatan di awal terbentuknya China atau di era Mao Zedong identik dengan ideologi, eksistensi Amerika Serikat dan aliansinya serta dukungan penuh terhadap persatuan negara-negara korban kolonialisme pihak barat, khususnya negara-negara Afro-Asia. Awal tahun 1950-an merupakan awal dari interaksi China terhadap kawasan Asia Selatan. Kebijakan luar negeri China pada saat itu masih beraliansi dengan Uni Soviet sebagai sesama negara yang memiliki ideologi komunis. Keduanya mengembangkan konsep *World of Two Camps* sebagai bentuk perlawanan terhadap pihak barat, terutama Amerika Serikat (Choudhury, 1990). Hal ini kemudian sejalan dengan China yang memilih India sebagai partner pertamanya di kawasan Asia Selatan, dimana India memiliki pemikiran yang sama untuk melawan imperialisme barat daripada memilih

Pakistan yang pada saat itu lebih pro terhadap Amerika Serikat.

Solidaritas antara China dan kawasan Asia Selatan semakin erat tatkala terlibat dalam KAA pada tahun 1955 di Bandung, Indonesia bersama beberapa negara kawasan Asia Selatan lainnya seperti Pakistan, Ceylon (kini bernama Sri Lanka) dan Nepal. Namun solidaritas ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1959, China terlibat isu perbatasan dengan India yang kemudian memunculkan perang antara keduanya di tahun 1962. Kebijakan luar negeri China di kawasan Asia Selatan berubah dan cenderung dipengaruhi oleh isu keamanan dan militer. China kemudian meninjau kembali kebijakan luar negerinya terhadap kawasan Asia Selatan dengan mulai meningkatkan hubungan luar negerinya dengan Pakistan, sedangkan India mulai mendapat bantuan ekonomi dan asistensi militer dari Amerika Serikat.

B. Kebijakan Luar Negeri China Di Kawasan Asia Selatan Era Deng Xiaoping (1978-1990)

Setelah berakhirnya era pemerintahan Mao Zedong pada tahun 1976, China memiliki seorang pemimpin baru, yaitu Deng Xiaoping. Pemerintahan Deng Xiaoping dimulai sejak tahun 1978 dan era ini disebut sebagai era perubahan besar bagi China. Berbeda dengan era sebelumnya yang lebih fokus pada ideologi, era Deng Xiaoping lebih memfokuskan pada pembangunan ekonomi. Dalam realisasinya Deng memiliki program yang diberi nama dengan *Four Modernization* sebagai prioritas utamanya. Program ini memiliki fokus untuk memperkuat sektor pertanian, industri, ilmu pengetahuan & teknologi, dan pertahanan. Selain itu, China juga mengadopsi kebijakan *Reforms and Opening*, yaitu sebuah

kebijakan dimana China mulai merubah sistem ekonomi dan mulai terbuka terhadap perdagangan dan investasi internasional serta siap menjalin kerjasama baik bilateral atau multilateral dan pada level regional maupun internasional. Dalam rangka mencapai keberhasilan terhadap pembangunan ekonominya, China juga menekankan prinsip perdamaian terhadap hubungan luar negerinya, terutama dengan negara-negara di sekitarnya.

Perubahan-perubahan ini secara otomatis memberikan berdampak terhadap kebijakan luar negeri China di kawasan Asia Selatan. Di kawasan Asia Selatan, arah kebijakan luar negeri China di bawah pemerintahan Deng Xiaoping telah membawa era baru terhadap interaksi antara kedua pihak. Setelah melewati dekade-dekade yang penuh dengan intrik dan konflik, interaksi China dan kawasan Asia Selatan mulai membaik. Hal ini dimulai dengan normalisasi hubungan bilateral antara China dan India yang sempat berada pada fase terburuk karena konflik Tibet yang dimulai pada tahun 1959 dan menyebabkan perang antara keduanya di tahun 1962. Kemudian, setelah China mulai mengadopsi kebijakan *reforms and opening*, interaksi China dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan semakin meningkat, terutama dalam hubungan ekonomi dan politik. Di era Deng Xiaoping, China juga telah berhasil menjalin kerjasama hampir dengan semua negara di kawasan Asia Selatan.

C. Kebijakan Luar Negeri China Di Kawasan Asia Selatan Era Jiang Zemin (1990-2002)

Setelah berakhirnya pemerintahan Deng Xiaoping, China berada di bawah pemerintahan Jiang Zemin. Era ini pada dasarnya tidak terlalu berbeda karena masih meneruskan reformasi yang telah dimulai

sejak era sebelumnya. Namun, di awal era Jiang Zemin, China harus berhadapan dengan berbagai masalah yang timbul akibat dari *Tiananmen Massacre* atau peristiwa pembantaian yang terjadi di Tiananmen Square pada tahun 1989. Peristiwa ini telah membuat persepsi dunia terhadap China memburuk dan China banyak mendapatkan sanksi-sanksi internasional, terutama dalam sektor ekonomi dan pertahanan. China di Era Jiang Zemin juga merupakan era berakhirnya *Cold War* yang pada akhirnya menumbangkan Uni Soviet dan ideologi komunisnya serta merubah iklim hubungan internasional. Selain itu, era ini juga identik dengan isu senjata nuklir dan peristiwa 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat yang kemudian meningkatkan isu terorisme dan keamanan internasional. Beberapa peristiwa di atas identik pada arah kebijakan luar negeri China di kawasan Asia Selatan, terutama peristiwa berakhirnya cold war, isu kepemilikan senjata nuklir dan 9/11.

Setelah berakhirnya *Cold War*, kebijakan luar negeri China di kawasan Asia Selatan lebih mengikuti arus globalisasi dan menggunakan kerangka kerjasama multilateral untuk meningkatkan hubungan diplomatik dan ekonominya (Takahara, 2012). Kemudian, dalam meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Selatan, China juga sepakat untuk beberapa dokumen perjanjian, misalnya *Treaty of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control* di garis perbatasan antara China dan India (Aoyama, 2010). Selain itu, kebijakan luar negeri China era Jiang Zemin juga ditandai dengan isu kepemilikan senjata nuklir dan peristiwa 9/11. India dan Pakistan terkenal sebagai dua kekuatan nuklir di kawasan Asia Selatan. Menanggapi hal ini, China tetap pada prinsipnya bahwa China menghormati kedaulatan sebuah negara dan menerapkan kebijakan *non-interference* atau tidak

terlibat dalam urusan dalam negeri negara lain. China juga menghimbau kepada agar negara-negara di kawasan Asia Selatan lainnya untuk mencegah rencana pengembangan senjata nuklir India dan Pakistan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Selatan (Zhang, 1999). Kemudian, peristiwa 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat di awal abad ke-21 telah meningkatkan isu terorisme dan keamanan internasional. Peristiwa ini juga memberikan pengaruh terhadap kebijakan luar negeri China di kawasan Asia Selatan. China kemudian lebih fokus pada perkembangan hubungan antara India dan Pakistan serta memastikan perdamaian di kawasan dengan memainkan peran penting sebagai bagian dari komunitas internasional yang aktif di level diplomatik (Siddiqi, 2014).

D. Kebijakan Luar Negeri China Di Kawasan Asia Selatan Era Hu Jintao (2002-2012)

Kemudian, sejak berakhirnya era kepemimpinan Jiang Zemin, China dipimpin oleh Hu Jintao. Di era ini China masih dihadapkan dengan berbagai tantangan di abad ke-21, seperti isu terorisme dan keamanan internasional pasca peristiwa 9/11 serta globalisasi. Eksistensi China dalam perekonomian global juga semakin meningkat tatkala China semakin menekankan kebijakan luar negeri yang sifatnya terbuka untuk semua negara dalam kerangka kerjasama multilateral, khususnya dalam kerjasama ekonomi. China telah dituntut untuk berbenah dalam sektor ekonominya dan mengikuti sistem internasional yang baru sejak liberalisasi ekonomi pada tahun 1991 yang memungkinkan semua negara untuk turut dalam kerangka perdagangan bebas. Kemudian, untuk kebijakan luar negeri China di bawah kepemimpinan Hu Jintao dikenal dengan prinsip *Harmonious World*

sebagai kelanjutan dari prinsip Harmonious Society. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Hu Jintao dalam *World Summit and 60th General Assembly of The United Nation* pada tahun 2005 (C. Fred Bergsten, et. al, 2006). Dalam prinsip ini, China berkomitmen untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia. Maka dari itu, di era Hu Jintao, China sangat mengupayakan kerangka kerjasama multilateral di berbagai kawasan untuk mencapai perdamaian internasional.

Kemudian, kebijakan luar negeri China di kawasan Asia Selatan di era Hu Jintao sendiri pada dasarnya masih meneruskan kebijakan luar negeri era sebelumnya, yaitu meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan. Untuk sektor perekonomian, China juga banyak menanamkan investasi di berbagai sektor. China memang harus menghadapi dampak buruk dari krisis global, namun tercatat ekspor China di kawasan Asia Selatan justru meningkat. Selain itu China juga banyak menanamkan investasi di berbagai sektor. Kemudian dalam sektor keamanan, China juga meningkatkan upaya diplomatiknya dengan hampir semua negara di kawasan Asia Selatan. Misalnya pasca peristiwa krisis Mumbai yang meningkatkan isu terorisme di kawasan Asia Selatan. China melalui menteri luar negerinya, He Ya Fei melakukan kunjungan kenegaraan di New Delhi dan Islamabad. Dalam kunjungan ini, China banyak menekankan adanya kerjasama China untuk meningkatkan perdamaian dan perlawanan terhadap terorisme, khususnya di kawasan Asia Selatan. Selain itu, China juga meningkatkan kerjasama militernya dan menjadi partner terbesar bagi negara-negara di kawasan Asia Selatan, khususnya untuk *supply* peralatan militer. Kemudian, untuk lebih memperdalam integrasi China dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan, pada

tahun 2005 China secara resmi bergabung dalam SAARC sebagai observer saat KTT SAARC di Dhaka dengan dukungan dari Bangladesh, Nepal, dan Pakistan. Tahun 2010 China bahkan memberikan dana sebesar US\$600,000 untuk dana pengembangan SAARC. China juga tergabung dalam BRICS atau asosiasi lima negara dengan perekonomian yang sedang berkembang dengan salah satu negara kawasan Asia Selatan, yaitu India.

E. Kebijakan Luar Negeri China Di Kawasan Asia Selatan Era Xi Jinping (2012-2017)

Pemerintahan China yang baru di bawah Xi Jinping sejak tahun 2012 telah memberikan beberapa perubahan baik dalam politik domestik maupun luar negeri. Dalam urusan politik domestik, pemerintahan era Xi Jinping memberikan beberapa inisiatif untuk kebijakan dalam negerinya, misalnya mengendalikan bunga bank, mengurangi korupsi, dan memperkuat kontrol terhadap media dan opini publik. Kemudian, untuk kebijakan luar negerinya, China di bawah pemerintahan Xi Jinping sebenarnya masih meneruskan kebijakan dari era era sebelumnya, namun China juga memberikan beberapa perubahan. *The Five Principles of Peaceful Co-existence* sampai saat ini masih memiliki pengaruh penting sebagai dasar dari kebijakan luar negeri China. Kongres ke-18 PKC mengisyaratkan bahwa China akan melanjutkan *Independent Foreign Policy* nya dan menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan konflik internasional. China juga masih mencoba untuk menjalin hubungan dengan banyak negara dengan tidak membentuk aliansi-aliansi tertentu. Sebelum pemerintahan Xi Jinping, kebijakan luar negeri China juga cenderung menekankan pada konsep *harmonious world* dan *low profile*. Kini, China di bawah

pemerintahan Xi Jinping menggunakan konsep *Chinese Dream* (Glaser, 2014).

Konsep Chinese Dream ini memiliki dua obyek utama, yaitu: tekad China untuk menjadi negara maju di tahun 2020 dan memastikan China sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dengan berkurangnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Timur dan politik internasional yang semakin menuju ke arah multi-polar, apabila dibandingkan dengan kebijakan luar negeri China di era Deng Xiaoping, Jiang Zemin, atau Hu Jintao, orientasi kebijakan luar negeri China di era Xi Jinping lebih pada pembaharuan dalam beberapa aspek, seperti: hubungan antar negara, gaya diplomasi, dan hubungan internasional (Akhir, 2017). China di era Xi Jinping juga semakin aktif dalam upaya diplomasinya dengan lebih banyak melakukan kunjungan kenegaraan, peresmian berbagai nota kesepahaman dan perjanjian, menghadiri forum ataupun konferensi-konferensi tingkat tinggi. Di awal kepemimpinannya, Xi Jinping telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Russia, menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan dan menyempatkan untuk melakukan kunjungan di Tanzania dan Republik Kongo. Langkah ini kemudian diikuti oleh PM Li Keqiang yang juga melakukan kunjungan ke India dan Pakistan, serta Swiss dan Jerman. Xi Jinping kemudian kembali melakukan kunjungan kenegaraan di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat (Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of China, 2013).

Dalam menghadapi tantangan global di era kontemporer seperti masalah keamanan kawasan, China terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara untuk melawan terorisme. Terorisme saat ini masih menjadi fokus utama dalam prioritas keamanan China. Bersama dengan isu separatisme dan

ekstremisme, terorisme dikategorikan sebagai *Three Evils* dalam *2015 Defense White Paper* (Merics, 2017). Tak hanya itu, di sektor ekonomi, sebagai negara yang menduduki posisi kedua dengan perekonomian terbesar di dunia, China juga semakin meningkatkan volume perdagangan luar negerinya. Tercatat bahwa sesaat setelah Xi Jinping mulai memimpin China di akhir tahun 2012, angka ekspor dan impor China adalah US\$3,87 triliun (National Bureau of Statistics of China, 2013). Hingga tahun 2017 angka ekspor dan impor China menjadi US\$4,10 triliun. Partner ekspor utama China adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Hongkong, Jepang, dan Korea Selatan. Selain meningkatkan volume perdagangan internasional, China juga memperbanyak investasinya dalam beberapa sektor dan proyek-proyek besar di berbagai negara. Masih di sektor ekonomi, China juga sukses membentuk beberapa program, diantaranya: *The Asian Infrastructure Investment Bank*, *The Silk Road Fund*, *The New Development Bank* dan *The Belt and Road Initiative* (BRI).

Beberapa perubahan sejak Xi Jinping memimpin China juga berlaku dalam kebijakan luar negeri China di kawasan Asia Selatan. Sejak dahulu, China selalu ingin memperluas pengaruhnya dalam sektor ekonomi dan politik di kawasan Asia Selatan. Kebijakan luar negeri China di kawasan ini juga merupakan kombinasi dari beberapa faktor seperti, kerjasama ekonomi, masalah perbatasan, keamanan kawasan, pertumbuhan India sebagai negara berpengaruh di kawasan Asia Selatan dan eksistensi Amerika Serikat (Kaura, 2018). Sebagai negara yang berhadapan langsung dengan kawasan ini, China selalu mengupayakan pendekatan yang lebih kooperatif dengan menggunakan instrumen kerjasama ekonomi. Hal ini juga tak lepas dari status China yang kini

menjadi negara dengan perekonomian terbesar di Asia dan kedua setelah Amerika Serikat di level global. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan dari Xi Jinping selama kunjungannya di beberapa negara kawasan Asia Selatan, terutama di India dan Pakistan pada tahun 2014 dan 2015 lalu. Xi menyatakan bahwa kawasan Asia Selatan yang damai, stabil, dan makmur akan memberikan pengaruh positif untuk banyak pihak. Xi juga memprediksikan bahwa kawasan Asia Selatan akan tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru yang menggerakkan perekonomian di Asia dan bahkan dunia. Maka dari itu, China siap dan bersedia untuk menyelaraskan strategi pembangunannya dengan negara-negara Asia Selatan untuk mencapai pembangunan yang saling menguntungkan demi kesejahteraan bersama (Indian Council of World Affairs, 2014).

Untuk mewujudkan hal tersebut, China di era Xi Jinping semakin menekankan kerjasama terutama kerjasama ekonomi dengan negara-negara kawasan Asia Selatan. Tercatat bahwa China total angka perdagangan China dan kawasan Asia Selatan di tahun 2014 mencapai US\$106.02 milyar dengan angka ekspor China ke kawasan Asia Selatan sebesar US\$85.83 milyar dan impor Asia Selatan ke China sebesar US\$20.19 milyar. menjelang akhir tahun 2014, Deputy Kementerian Luar Negeri China, menyatakan bahwa China ingin meningkatkan perdagangan China dengan kawasan Asia Selatan hingga US\$150 milyar (Xinhua, 2014). China juga memiliki proyek besar yang melibatkan kawasan Asia Selatan yaitu *Belt and Road Initiative*. Proyek BRI merupakan strategi pembangunan China di bawah pemerintahan Xi Jinping yang memiliki fokus pada konektivitas dan kerjasama antara China dan negara-negara Eurasia. Banyak dari negara-negara anggota SAARC tertarik untuk

bergabunga dalam proyek ini, baik bergabung dalam program yang berbasis pada *Silk Road Economic Belt* di jalur darat atau *Maritim Silk Road (MSR)* di jalur laut (Su, 2017). Salah satu proyek penting China dalam BRI di kawasan Asia Selatan adalah CPEC. Melalui CPEC, China dapat memiliki akses menuju Laut Arab melalui Gwadar Port di Pakistan.

Selain sektor ekonomi, kebijakan luar negeri China di kawasan Asia Selatan era Xi Jinping selanjutnya adalah tentang isu terorisme, separatisme, dan ekstremisme. China melihat bahwa terorisme, separatisme, dan ekstremisme merupakan ancaman yang serius bagi stabilitas kawasan. Maka dari itu, China kemudian mengupayakan stabilitas kawasan, seperti di kawasan Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika, dan terutama di Asia Selatan. Hal ini awalnya merujuk kepada etnis Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. China khawatir apabila para separatis Uighur menggunakan wilayah Xinjiang untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah China atau bekerjasama dengan kelompok Islam radikal yang telah beroperasi di Afghanistan dan Pakistan. Selain itu, beberapa peristiwa seperti serangan terorisme di wilayah perbatasan, bom bunuh diri di Tiananmen Square, dan serangan di Kunming juga telah meningkatkan fokus China untuk memerangi terorisme. Kemudian, untuk kebijakan luar negeri China di kawasan Asia Selatan, khususnya dalam isu terorisme, separatisme, dan ekstremisme China melakukan kerjasama dengan beberapa negara, terutama dengan India, Pakistan, dan Afghanistan.

Di era Xi Jinping, tepatnya pada tahun 2015, PM Modi melakukan kunjungan ke China dan kedua negara sepakat untuk mengancam segala bentuk tindakan terorisme dan keduanya berkomitmen untuk bekerjasama dalam melawan terorisme (Press

Information Bureau, 2015). Masih di tahun yang sama, China dan India juga mengeluarkan pernyataan bersama dimana kedua negara meningkatkan kerjasama untuk melawan terorisme internasional. Selain itu, China juga bekerjasama dengan Pakistan dan berharap bahwa Pakistan melakukan perlawanan untuk mengurangi aktivitas dari *The Eastern Turkestan Islamic Movement* (ETIM) dan *The Eastern Turkistan Islamic Party* (ETIP) (Shannon Tiezzi, 2013). Kemudian beberapa waktu lalu, China, Pakistan, dan Afghanistan melakukan pertemuan trilateral dan sepakat untuk membangun kerjasama untuk memerangi terorisme demi perdamaian dan stabilitas kawasan. China juga menyatakan bahwa Pakistan dan Afghanistan merupakan partner kerjasama yang penting dan telah memberikan kontribusi besar dalam kampanye memerangi terorisme internasional, terutama dalam upaya memerangi terorisme di kawasan Asia Selatan.